

SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DI SEKOLAH DASAR

Chairiyah¹, Nadziroh², Wachid Pratomo³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

^{1,2,3}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: rhiya_pasca@yahoo.com¹

Abstract: A school is a place for the government to carry out its obligations to fulfill the education rights of Indonesian citizens. In addition to the right to education which is a constitutional mandate, schools are also part of the fulfillment of children's rights based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the Child-Friendly School program involved 12 ministries, agencies, and foundations related to child welfare. The goal of the Child-Friendly School policy is to be able to fulfill, guarantee and protect the rights of children. Another goal is to ensure that schools can develop children's interests, talents, and abilities and prepare children to be responsible for a life of tolerance, mutual respect, work together for progress, and a spirit of peace so that later schools are expected to not only give birth to an intellectually intelligent generation but also give birth to an emotionally and spiritually intelligent generation.

Keywords: Children's rights, child-friendly schools

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan artikel ini adalah adanya persoalan yang terjadi disekolah yang menyangkut masalah hak anak. Dikutip dari laman KPAI, data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2019 mencatat bahwa 67 % kekerasan bidang pendidikan terjadi di jenjang sekolah dasar, dimana trend kasusnya di dominasi oleh *bullying* dan kekerasan fisik. Data-data ini besumber dari divisi pengaduan KPAI, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online. Sampai saat ini juga masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujaan, kebanjiran, selain ancaman mengalami *bullying* dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk memutus mata rantai kekerasan di lingkungan pendidikan adalah menggalakkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Seperti kita ketahui bersama mendidik anak tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua saja, melainkan juga tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Implementasi Sekolah Ramah Anak dimulai dari guru, kepala sekolah dan petugas sekolah. Langkah awal dengan cara tidak menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan para siswa. Jadi, adanya Sekolah Ramah Anak harapannya adalah anak bisa belajar dengan nyaman, senang, tentram, tidak terancam, menumbuhkan karakter dan mandiri

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengulas tentang Sekolah Ramah Anak yang telah digagas oleh berbagai pihak sejak tahun 2015 dengan harapan Sekolah Ramah Anak dapat dapat memberikan manfaat yang positif khusus bagi anak didik, guru, kepala sekolah, orang tua serta masyarakat dan *stakeholder* pendidikan pada umumnya.

PENGERTIAN ANAK

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang di Indonesia:

1. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
4. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

MACAM-MACAM HAK ANAK

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
 - a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental, memiliki hak: (1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - k. Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi: a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya

- hukum yang berlaku. d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
 - i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1) diskriminasi; 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) penelantaran; 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5) ketidakadilan; dan 6) perlakuan salah lainnya.
 - k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) pelibatan

dalam kerusuhan sosial; 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5) pelibatan dalam peperangan.

- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari macam-macam hak anak yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pemerintah

KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK

Ki Hajar Dewantara dalam Zuriyah (2011:122) menyatakan bahwa pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan mengendalikan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendapatnya mengenai esensi dari sebuah pendidikan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu mengajarkan berbagai ilmu kepada anak didik dengan harapan agar anak dapat menjadi pribadi yang baik dan sempurna hidupnya dan selaras dengan masyarakat beserta alamnya. Untuk itulah diperlukan jaminan keamanan terhadap proses belajar mengajar siswa yang

bebas dari aksi *bullying*, *body shaming*, dan lain sebagainya dengan dibuktikan adanya sekolah ramah anak ditinjau dari berbagai aspek.

Seperti kita ketahui bersama bahwa sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak untuk menuntut ilmu dengan baik dan nyaman ternyata banyak ditemukan kasus-kasus yang membuat citra pendidikan tercoreng, misalnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya, kasus perkelahian antar siswa yang berujung tragis, dan lain sebagainya. Kasus-kasus seperti itulah yang menjadi latar belakang adanya Sekolah Ramah Anak di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk sekolah ramah anak, yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Definisi Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Berikut prinsip yang mendasari terciptanya sekolah ramah anak:

1. Non diskriminasi, artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak.
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak, artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya.
5. Pengelolaan yang baik, artinya adanya jaminan akan keterbukaan,

akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang didirikan sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama anak di sekolah.

KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Merujuk pada aturan yang tertuang dalam Panduan Sekolah Ramah Anak yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Tumbuh Kembang Anak (2015:15-20), terdapat 6 macam komponen yang harus ada pada Sekolah Ramah Anak, antara lain:

1. Adanya komitmen tertulis terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak. Komitmen tertulis dalam bentuk pakta integritas dibutuhkan sebagai komitmen semua pihak dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan pada anak. Guna mewujudkan komponen ini, maka di sekolah dibentuklah semacam tim yang terdiri dari unsur pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya tim ini membuat kebijakan dan larangan tindakan kekerasan dan pelecehan serta pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Kebijakan yang dibuat disosialisasikan sebagai bentuk penyadaran kepada semua komponen masyarakat di sekolah.
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak. Proses pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) juga digambarkan dalam kondisi yang tidak membeda-bedakan (non diskriminatif), tidak bias gender, memperhatikan hak-hak anak, serta dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Penilaian hasil belajar mengacu kepada apa yang menjadi hak-hak bagi anak. Tak hanya itu, pada proses pembelajaran diharapkan bahan yang digunakan bebas dari unsur pornografi dan kekerasan. Proses yang dapat meningkatkan

- kedekatan antara pendidik dan peserta didik.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA. Berbagai komponen di sekolah membutuhkan pelatihan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Komponen tersebut antara lain pimpinan pendidikan satuan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pembimbing ekstrakurikuler. Pelatihan hak-hak anak serta pembinaannya bisa dilakukan dalam bentuk grup kerja.
 4. Sarana dan Prasarana SRA. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak (SRA) harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran dan akses jalan keluar darurat yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek kesehatan, kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan seperti pada kondisi ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih dan sebagainya. Kenyamanan ruang belajar juga masuk dalam aspek kenyamanan, ruangan dengan kondisi yang sesuai dengan jumlah murid, suhu, udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman dijadikan tempat belajar.
 5. Partisipasi Anak. Pada komponen partisipasi, setiap anak diberi jaminan dalam proses pengaduan dari kasus yang mungkin dialami. Peserta didik diberi hak membuat komunitas anti kekerasan, memberikan hak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Anak juga dilibatkan pada penyusunan rencana kerja SRA, mengikutkan perwakilan dari peserta didik dalam tim SRA di sekolah serta mendengarkan apa yang menjadi usulan dan masukan dari peserta didik.

6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibuat dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen di masyarakat seperti pihak orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat, para alumni maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memberikan masukan dan keterlibatan positif dalam pelaksanaan SRA tersebut. Pihak seperti orangtua dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan program-program Sekolah Ramah Anak yang berkesinambungan hingga ke lingkungan keluarga. Pihak seperti dunia usaha dapat dijadikan sebagai mitra relasi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bertindak sebagai sponsor dan sejenisnya. Lembaga masyarakat pun perlu digandeng bersama untuk mengetahui pelaksanaan SRA tersebut. Pihak eksternal ini juga bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan terkait SRA, termasuk memberikan usul dan saran yang membangun.

Apabila keenam komponen diatas diimplementasikan dengan baik maka akan terwujud Sekolah Ramah Anak, adapun ciri-ciri Sekolah Ramah Anak yaitu: 1) Semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan nonverbal. 2) Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. 3) Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. 4) Anak merasa *enjoy*, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. 5) Guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. 6) Makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. 7) Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. 8) Tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi.

Dengan demikian kebijakan Sekolah Ramah Anak diharapkan dapat memenuhi,

menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

KESIMPULAN

Ketentuan Sekolah Ramah Anak tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenkes PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Lahirnya SRA sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Tujuan disusunnya kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, setiap sekolah dipastikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk semangat perdamaian.

Dengan demikian kebijakan Sekolah Ramah Anak membutuhkan dukungan dan

kerja sama yang baik antara anak didik, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, stakeholder pendidikan, dan pemerintah sehingga diharapkan adanya Sekolah Ramah Anak akan memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rega, Maradewa. 2019. KPAI: 67% Kekerasan Bidang Pendidikan terjadi di Jenjang SD. Dikutip dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di-jenjang-sd> pada tanggal 23 Mei 2021.

Tim Penyusun. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Zuriah, Nurul. 2011. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.